

KOMUNIKASI DALAM NEGOSIASI POLITIK BREXIT

M. Elfan Kaukab¹, Wiji Yuwono²

ABSTRAK

Hasil referendum Brexit, terkait tetap bergabung atau berpisahnya Inggris dari Uni Eropa, telah menimbulkan turbulensi politik maupun ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam proses negosiasi antar aktor politik dalam menyelesaikan masalah Brexit. Hasil dari referendum Brexit diumumkan 51,9% suara menginginkan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% mendukung Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Konsekuensi dari komunikasi negosiasi politik yang terjadi yaitu Inggris akan kehilangan semua hak suara dan pengaruhnya Uni Eropa selama waktu itu, tetapi hak lainnya akan tetap sama, termasuk hak warga negara Eropa untuk tinggal dan bekerja di Inggris, pengawasan pengadilan Uni Eropa, dan pembayaran anggaran. Hubungan di masa yang akan datang masih harus dinegosiasikan secara penuh, tetapi Inggris dan UE bertujuan untuk menetapkan "kawasan perdagangan bebas" sebagai hubungan masa depan yang akan datang.

Kata kunci: Komunikasi, Negosiasi, Politik, Brexit

ABSTRACT

The results of the Brexit referendum, related to remaining joining or separating Britain from the European Union, have created political and economic turbulence. The purpose of this study was to analyze how communication was carried out in the negotiation process between political actors in resolving the Brexit issue. The result of the Brexit referendum was announced that 51.9% of the vote wanted Great Britain to leave the European Union and 48.1% supported the UK to remain in the European Union. The consequence of the political negotiation communication that occurs is that the UK will lose all voting rights and influence to the European Union during that time, but other rights will remain the same, including the right of European citizens to live and work in the UK, supervision of EU courts, and budget payments. Future relations still need to be fully negotiated, but the UK and EU aim to establish a "free trade area" as a future relationship.

Keywords: Communication, Negotiation, Politics, Brexit

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia. Email: elfan@unsiq.ac.id

² Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Email: wijiyuwono.psc20@mail. umy.ac.id

PENDAHULUAN

Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (UE), biasa disingkat Brexit (singkatan dari "*Britain*" dan "*exit*") (Hunt, 2008) adalah kemungkinan (proses dan rencana) penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016, referendum Brexit ini diadakan untuk memutuskan apakah Britania Raya harus meninggalkan keanggotaannya atau tetap tergabung dalam Uni Eropa. Referendum ini diikuti oleh 30 juta pemilih, yang berarti partisipasi total didalamnya mencapai 71,8% dari penduduk yang memiliki hak pilih di Britania Raya, hasilnya sendiri adalah 51,9% memilih untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% memilih untuk tetap tergabung dengan Uni Eropa (Hunt, 2008).

Sebagai salah satu tahapan untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa, Britania Raya diharuskan untuk meminta digunakannya Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa kepada Dewan Eropa, dan pada 29 Maret 2017, pemerintah Britania Raya resmi menggunakan Artikel 50 dan mengajukan penarikan diri kepada Dewan Uni Eropa (Wilkinson, 2017). Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Artikel 50 mengenai waktu tenggang yang diberikan untuk negara yang berencana keluar dari Uni Eropa, Britania Raya diberikan waktu hingga tepat pada tengah malam tanggal 30

Maret 2019, Waktu Eropa Tengah, untuk secara resmi meninggalkan Uni Eropa (Wilkinson, 2017).

Pada 17 Januari 2017, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan 12 pokok rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa, May juga sekaligus memastikan bahwa nantinya Britania Raya tidak akan lagi tergabung dalam Pasar Tunggal dan Serikat Pabean Uni Eropa (Wilkinson, 2017; Mctagu, 2017). Bersamaan dengan itu, May juga berjanji untuk mencabut Undang-Undang Masyarakat Eropa tahun 1972, dan menggabungkan semua hukum dan aturan Uni Eropa yang masih berlaku kedalam hukum dan aturan Britania Raya (BBC, 2016). May membentuk kementerian sendiri untuk mengatur mundurnya Britania Raya dari Uni Eropa, kementerian ini diberi nama Departemen untuk Keluar dari Uni Eropa (*Department for Exiting European Union - DExEU*) dan diresmikan pada Juli 2016, May juga menunjuk David Davis sebagai Sekretaris Negara memimpin departemen tersebut (Civil Service World, 2018). Perundingan antara pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa pada akhirnya resmi dimulai pada 19 Juni 2017 (Hunt, 2008).

Menilik dari sejarahnya, Britania Raya sendiri mulai bergabung dalam Komunitas Eropa pada tahun 1973, meski begitu terdapat dorongan untuk melakukan referendum dari banyak pihak yang tidak

setuju apabila Britania Raya bergabung dalam Komunitas Eropa, sehingga pada tahun 1975 diadakan referendum 1975, tetapi hasil dari referendum tersebut justru memenangkan pihak yang setuju untuk bergabung sehingga semakin melegitimasi kebijakan Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Komunitas Eropa (Williamson, 2016). Di era 1970-an dan 1980-an, wacana untuk mengundurkan diri dari Komunitas Eropa utamanya banyak digalang oleh anggota dan tokoh-tokoh dari Partai Buruh dan Serikat Buruh. Mulai era 1990-an, pendukung kuat dari wacana ini adalah Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) dan anggota-anggota dari Partai Konservatif yang memiliki pandangan "*Eurosceptic*" (Crowson, 2007).

Untuk efek Brexit ini sendiri dalam jangka pendek, terdapat penelitian yang berfokus pada pengaruh kebijakan Brexit sejak diadakannya referendum hingga Juli 2017, penelitian ini mengungkapkan bahwa Britania Raya mengalami kerugian tahunan sebesar £404 untuk tiap rumah tangga rata-rata, kemudian menurunnya nilai mata uang pound sterling dimana nilai pound sterling masih 10% dibawah nilai sebelum referendum, lalu meningkatnya inflasi hingga 1,7% (Sampson, 2017), Banyak pakar riset ekonomi dunia yang beranggapan bahwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa ini akan memiliki efek

terhadap perekonomian Britania Raya, mereka memprediksi bahwa langkah Britania Raya ini akan mengurangi pendapatan riil per-kapita Britania Raya dalam jangka menengah dan panjang (Goodman, 2016). Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa juga diprediksi akan menurunkan jumlah pendatang dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya (Portes, 2016), dan hal ini dapat berimplikasi kepada pendidikan tinggi dan riset akademis di Britania Raya (Mayhew, 2017). Dampak persis keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa sendiri masih harus melihat apakah keluaran ini terjadi dengan cara keras (*Hard Brexit*) yang berarti tidak terjadi kesepakatan sama sekali antara Britania Raya dan Uni Eropa, atau cara lunak (*Soft Brexit*) dimana masih terdapat hak-hak yang dapat dinikmati oleh Britania Raya meskipun telah keluar dari Uni Eropa (BBC, 2017). Dengan latar belakang tersebut penelitian ini merumuskan masalah yang akan dianalisis bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam proses negosiasi antar actor politik dalam menyelesaikan masalah Brexit.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif. Penulis melakukan analisis dengan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan adalah buku-

buku mengenai ilmu hubungan internasional yang akan mendukung analisis konseptual, serta artikel, laporan, sumber daring, dan liputan dari majalah ataupun koran terkait posisi perempuan dalam hukum humaniter internasional, disertai dengan materi-materi pendukung lainnya. Sumber-sumber tersebut diolah dan dipilih secara selektif sehingga kredibilitas datanya dapat dipercaya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Proses Negosiasi Brexit

Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron memberikan pernyataan bahwa apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilihan umum 2015, Pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan bagi Britania Raya untuk melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa, termasuk didalamnya referendum untuk tetap tergabung atau keluar dari Uni Eropa (BBC, 2013).

Pada pemilihan umum 2015, Partai Konservatif menang dengan suara mayoritas (The Guardian, 2015), dan tak lama kemudian Akta Referendum Uni Eropa 2015, yang telah dirancang dan dibahas selama dua tahun (UK Parliament, 2018), diajukan ke Parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Cameron sendiri lebih memilih untuk tetap tergabung di Uni Eropa, dan dalam suratnya yang ditujukan kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa,

tertanggal 10 November 2015, menegaskan empat kepentingan Britania Raya dalam menegosiasikan kembali keanggotanya di Uni Eropa, empat kepentingan tersebut adalah: perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar *Eurozone*, pengurangan "pita merah", membebaskan Britania Raya dari "*ever-closer union*" dan memperkuat parlemen nasional, dan terakhir membatasi akses imigran dari Uni Eropa (BBC, 2018). Jajak pendapat pada tahun 2015 menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung agar Britania Raya tetap di Uni Eropa, tetapi dukungan tersebut dapat menghilang apabila David Cameron tidak berhasil menegosiasikan kembali kebijakan perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara diluar *Eurozone* dan juga pembatasan/pengurangan 'manfaat' dan 'tunjangan' bagi warga negara Uni Eropa (imigran) di Britania Raya (Swidlicki, 2015).

Pada Februari 2016, hasil negosiasi ulang antara Britania Raya dan Uni Eropa diumumkan, beberapa pembatasan tunjangan kerja untuk imigran baru dan juga status istimewa bagi Britania Raya dalam Uni Eropa telah disepakati. Tetapi sebelum aturan-aturan baru ini dapat diterapkan, Britania Raya harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Komisi Eropa dan kemudian dari Dewan Eropa (Spaventa, 2016). Pada dasarnya kesepakatan baru baru

bagi Britania Raya ini adalah untuk membuat sebuah mekanisme di dalam Uni Eropa untuk mengurangi laju pendatang ke suatu negara apabila negara tersebut mengalami kenaikan jumlah pendatang yang sangat masif, mekanisme ini disebut mekanisme "Rem Darurat" (Spaventa, 2016). Kemudian, mekanisme "kartu merah", dimana negara anggota Uni Eropa dapat mengembalikan aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Parlemen Eropa untuk dilakukan perubahan, mekanisme ini tidak sama dengan mekanisme veto, disini aturan tetap harus dijalankan apabila Parlemen Eropa telah merasa mengatasi permasalahan yang ada dalam aturan tersebut (Wyatt QC, 2016). Dalam sidang Parlemen Britania Raya pada 22 Februari 2016, yang bertujuan untuk membahas kesepakatan baru ini, Cameron mengatakan dalam pidatonya "negosiasi ulang telah usai dan Britania Raya telah berhasil memperjuangkan kepentingan mereka, dan Pemerintah akan melaksanakan komitmen mereka untuk mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016, untuk mengembalikan keputusan akhir kepada rakyat"(UK Parliament, 2016).

Organisasi kampanye resmi untuk para pendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa adalah *Vote Leave* (Pilih Keluar) (Stone, 2016). *Vote Leave* bersaing dengan organisasi kampanye lain, yaitu

Leave.EU, dalam menggalang suara meskipun mereka satu tujuan dalam kampanyenya (BBC, 2016). *Vote Leave* ditetapkan oleh Komisi Pemilihan sebagai organisasi kampanye resmi untuk referendum keanggotaan Uni Eropa. pada 13 April 2016 (Stone, 2016). Poster kampanye "Vote Leave" di Omagh, Irlandia Utara, bertuliskan "We send the EU £50 million every day. Let's spend it on our NHS instead." ("Kita mengirimkan £50 juta ke Uni Eropa tiap harinya. Mari kita pakai dana tersebut untuk NHS saja"). Sedangkan organisasi resmi untuk pendukung Britania Raya tetap dalam Uni Eropa adalah *Britain Stronger in Europe* (Britania Lebih Kuat di Eropa), biasa disebut sebagai *Remain* (Tinggal) (BBC, 2015). Organisasi ini digalang oleh Stuart Rose (The Electoral Commission, 2018).

Pada tanggal 24 Juni 2016, hasil dari referendum Brexit diumumkan, hasilnya 51,9% suara menginginkan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, dan 48,1% mendukung Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa (The Electoral Commission, 2018). Petisi yang menuntut pemerintah untuk mengadakan referendum kedua pun menjadi populer paska referendum, dan petisi ini berhasil menarik dukungan hingga empat juta tanda tangan (Hooton, 2016). Sejatinya petisi ini telah diunggah oleh William Oliver Healey

sebelum referendum dimulai, dan hanya mendapatkan dukungan 22 tanda tangan hingga sampai hasil referendum diumumkan, petisi ini juga menuntut agar setidaknya diadakan debat parlemen, karena Parlemen Britania Raya selalu mengadakan debat

apabila terdapat petisi yang dapat mengumpulkan lebih dari 100.000 suara, tetapi petisi ini ditolak oleh pemerintah secara resmi pada 9 Juli 2016 (BBC, 2016). Berikut hasil dari Referendum Brexit dalam tabel:

Tabel 1 Referendum Keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016

Pilihan	Suara	Percentase
Meninggalkan Uni Eropa	17,410,742	51.89%
Tetap menjadi anggota Uni Eropa	16,141,241	48.11%
Suara sah	33,551,983	99.92%
Suara tidak sah	25,359	0.08%
Jumlah suara	33,577,342	100.00%
Kehadiran pemilih terdaftar	46,500,001	72.21%
Kehadiran pemilih berdasarkan kecukupan umur	51,356,768	65.38%

Sumber: The Electoral Commission

Aktor Negosiasi Brexit

Bagian ini hendak menjelaskan posisi aktor-aktor kelas menengah dengan sumber daya ekonomi dan akses politik besar di Inggris juga menjelaskan bagaimana negara bagian di Inggris menentukan posisinya. Perlu diketahui bahwa referendum 23 Juni menghasilkan suara akhir yang dimenangkan dengan pilihan suara ‘pergi’ sebanyak 51.9% berbanding 48.1% memilih ‘tinggal’. Dengan jumlah referendum sebesar 71.8% dengan pemilih lebih dari 30 juta orang. Rincian dalam wilayah Inggris sendiri yaitu, Inggris memilih *Brexit* sebesar 53.4% dan pergi 46.6%, Wales memilih *Brexit* sebesar 52.5% dan tinggal 47.5%,

Skotlandia dan Irlandia Utara keduanya memilih tinggal di Uni Eropa, dengan perolehan suara tinggal dari Skotlandia sebesar 62% dan pergi 38% , sementara Irlandia Utara sebesar 55.8% dan pergi 44.2%. Wales memilih untuk keluar didasarkan karena adanya sentimen *voters*, Wales yang merupakan daerah termiskin di wilayah tersebut dan ‘ditinggalkan’ oleh kegiatan politik. Wales cenderung tidak stabil, tidak terdapat ‘ladang’ pekerjaan yang layak, dan wilayah ini didominasi oleh Partai Buruh. Jika dengan *vote* ini akan menyebabkan perbaikan kondisi dan mendapat perhatian politikus maka Wales akan tetap pada pilihan *vote* (O'Hagan,

2017). Dan *voters leave* akibat kegagalan Uni Eropa untuk mengatasi masalah ekonomi sejak 2008 dimana masih banyak terdapat pengangguran di Eropa Selatan sebesar 20%. Perbedaan antara kehidupan orang Eropa selatan dan Jerman-yang menikmati 4,2% pengangguran-sangat dalam (Kaukab dan Sahide, 2020). Eropa secara keseluruhan telah mengalami stagnasi secara ekonomi. Kemudian masalah kedaulatan dan timbulnya nasionalisme. Ada ketidakpercayaan yang tumbuh pada organisasi keuangan, perdagangan, dan pertahanan multinasional yang diciptakan setelah Perang Dunia II. Uni Eropa, IMF,

dan NATO adalah contoh bagus dari hal ini. Institusi Uni Eropa dipercaya tidak lagi melayani suatu tujuan. Tidak hanya itu, organisasi-organisasi ini mengambil alih kendali dari masing-masing negara. Ketidakpercayaan dan ketakutan kehilangan kendali membuat Brexit menjadi solusi yang masuk akal bagi mereka. Dan faktor terakhir adalah krisis imigrasi di Eropa merupakan pemicunya. Beberapa pemimpin Uni Eropa berpendapat bahwa membantu para pengungsi adalah kewajiban moral. Tapi Inggris memandang imigrasi sebagai isu nasional, karena mempengaruhi kehidupan internal negara.

Table 2 Aktor dalam Negosiasi Brexit

Aktor	
Domestik	David Davis (Sekretaris DExEU), Boris Johnson (Menteri Luar Negeri)
	Theresa May (Perdana Menteri), Liam Fox (Departemen Perdagangan Internasional (DIT)),
Internasional	Angela Merkel(kanselir Jerman), Francois Hollande (Presiden Francia), Jean-Claude Juncker (presiden komisi Eropa dan mantan perdana menteri Luxemburg)

Dalam negosiasi mengenai Brexit dengan Uni Eropa sendiri memiliki tiga wakil dari Inggris untuk bernegosiasi. Pertama dipimpin oleh anggota veteran parlemen konservatif dan juru kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa, David Davis. Kedua, mantan sekretaris pertahanan, Liam Fox yang sekarang bekerja sebagai sekretaris perdagangan

internasional. Ketiga, Boris Johnson yang merupakan pemimpin kampanye resmi untuk meninggalkan Uni Eropa yang juga menjabat sebagai sekretaris luar negeri. Mereka bertiga masing-masing diatur untuk berperan dalam negosiasi dengan Uni Eropa dan mencari kesepakatan internasional baru. Meskipun Theresa May, selaku perdana menteri, yang akan memiliki keputusan

akhir (Hunt & Wheeler, 2017). Theresa May merupakan salah satu aktor politik yang kuat karena memiliki kontrol terhadap Brexit dalam pemerintahan Inggris. Dia memiliki kesempatan kapan akan mengambil keputusan untuk memicu Pasal 50, seperti apa sikap Inggris dalam perundingan dan kesimpulan seperti apa yang dapat diterima. May dikabarkan mengumumkan tenggat waktu yaitu akhir Maret 2017 untuk memicu Pasal 50 tanpa pemberitahuan atau setidaknya berkonsultasi dengan kabinet.

Ketiga wakil yang dipilih May sendiri merupakan aktor penting di Inggris. David Davis, sekretaris untuk departemen yang baru dibentuk *Department for Exiting the European Union* (DExEU). DExEU adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengawasi perundingan yang mengarah ke pilihan ‘pergi’ Inggris dari Uni Eropa dan membangun hubungan post-Brexit EU-UK baru. Tahap awal persiapan Brexit telah ditandai dengan liputan media tentang peperangan antara Davis, Liam Fox, yang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Perdagangan Internasional baru, menuju Departemen Perdagangan Internasional (DIT), dan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Kepentingan datang dari pihak ketiga di tiga departemen. Brief Departemen

Perdagangan Internasional sangat dipersulit oleh ketidakpastian mengenai ekonomi masa depan yang diinginkan dan hubungan dagang dengan Uni Eropa, dan sejauh mana Inggris memiliki satu jembatan untuk mengejar semua aspek kebijakan perdagangan, termasuk kebebasan untuk membuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara ketiga. Oleh karena itu jelas bahwa berurusan dengan Brexit kemungkinan akan menyebabkan banyak masalah pada tingkat menteri dan birokrasi tumpang tindih (PSA, 2016). Beberapa aktor politik diluar Inggris adalah Angela Merkel selaku kanselir Jerman, Presiden Francis-Francois Hollande, Jean-Claude Juncker-presiden komisi Eropa dan mantan perdana menteri Luxemburg, ketiganya menolak keputusan Brexit dan menganggap bahwa Inggris dan Uni Eropa merupakan bagian tak terpisahkan dan bila sampai terjadi akan menjadi berita buruk dalam politik, ekonomi, dan sosial di Inggris maupun Eropa (Bloomberg, 2016).

Selain itu terdapat pula pengaruh dari partai-partai di dalam parlemen Inggris. Partai-partai ini yang akan mempengaruhi kecenderungan pilihan masyarakat di dalamnya dalam *vote*.

Tabel 3 Aktor Partai politik dalam Negosiasi Brexit

Partai Politik Domestik			
Voter	Partai	Aktor	Alasan
<i>Remain</i>	Buruh	Jeremy Corbyn	Ketenagakerjaan pembayaran tunai 44 triliun
	Partai Nasionalis Skotlandia		Mendapat keuntungan dari FTA di Uni Eropa
		Nicola Sturgeon	Independen Skotlandia, negara independen di dalam Uni Eropa. Bebas dari Inggris
<i>Leave</i>	Konservatif	David Cameron, George Osborne, Theresa May	
		Boris Johnson	Kedaulatan
	<i>The United Kingdom Independence Party (UKIP)</i>	Nigel Farage	Anti imigran, Supremasi hukum Uni Eropa
			Keuntungan FTA
	<i>The Democratic Unionists</i>	Arlene Foster	

Aktor partai politik yang paling mendominasi datang dari dua partai; Konservatif dan buruh. Partai konservatif salah satu yang terkuat namun suara mereka terbelah dua. David Cameron dan George Osborne merupakan tokoh politik di dalamnya yang ingin Inggris tinggal di Uni Eropa. Namun, yang berseberangan melihat referendum sebagai kesempatan memenangkan kembali kedaulatan Inggris yang hilang. Salah satu tokoh yang mengkampanyekan untuk Brexit adalah Boris Johnson. Sedangkan, dari partai tandingan konservatif yaitu Partai Buruh, lebih memilih tetap untuk berada di Uni Eropa dan mendukung proyek di Eropa

dimana Inggris terlibat didalamnya. Hal ini bisa dipahami karena keuntungan yang didapat bila Inggris masih berada di Uni Eropa yaitu dalam hal ketenagakerjaan sendiri buruh akan menerima pembayaran langsung dari EU senilai 44 triliun. Sebagian besar anggota mengkampanyekan untuk tetap tinggal karena negosiasi dianggap kurang memusatkan pada hak buruh. Jeremy Corbyn merupakan ketua Partai Buruh yang turut berada di parlemen menunjukkan tanda yang sebaliknya. Corbyn sendiri tidak terlalu gencar berkampanye seperti keinginan partainya.

Dari Partai Nasionalis Skotlandia sendiri merupakan partai pro-Uni Eropa,

namun terdapat dugaan bahwa beberapa nasionalis-salah satunya adalah menteri Skotlandia pertama, Nicola Sturgeon- dapat memilih Brexit untuk mempercepat keinginan kemerdekaan yang sempat dikalahkan/ditolak pada referendum 2014. Orang-orang Skotlandia sendiri lebih *Europhile* daripada *Eurosceptic*. Ideologi mereka lebih pada kesejahteraan dan ekonomi, dimana mereka menginginkan kemerdekaan dari Inggris sehingga dapat menjadi negara independen di dalam Uni Eropa. Dengan adanya Brexit ini akan berpengaruh pada perekonomian Inggris yang akan mempengaruhi ideologi kesejahteraan dan perekonomian negara yang mereka inginkan dimana mereka berusaha melindungi kepentingan ekonomi. Seperti Partai Nasionalis Skotlandia yang ingin memiliki kemerdekaannya sendiri, terdapat pula partai lainnya yang memiliki tujuan serupa yaitu *The United Kingdom Independence Party* (UKIP) dengan ambisi meninggalkan Uni Eropa. Nigel Farage sebagai ketua partai yang berada pada anti-imigrasi dalam UKIP turut sepakat bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa- masalah imigran yang saat ini dihadapi oleh Uni Eropa. Meskipun begitu, UKIP mengalami dilemma karena partai ini sendiri turut mendapat manfaat dari perdagangan bebas dengan Eropa dan meski Brexit terjadi isu imigran dan supremasi hukum Uni Eropa

akan masih terus berlanjut. Partai-partai Irlandia Utara sebagian memilih untuk tetap berada di Uni Eropa. *The Democratic Unionists*, dimana Arlene Foster yang merupakan menteri untuk pertama kali gencar melakukan kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa (Edward, 2017).

Klaim-klaim yang diajukan oleh mereka menunjukkan alasan-alasan penting konstituen, namun isu-isu tersebut sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor penting kelas menengah ini mempersepsikan integrasi Uni Eropa. Integrasi dan disintegrasi ini berujung pada pengorganisasian kepentingan ekonomi, bahkan dalam isu identitas sekalipun. Di satu sisi, kelompok *Leave* menginginkan sebuah tatanan ekonomi yang lebih eksklusif bagi orang-orang Inggris, dan di kelompok *Remain* menginginkan tatanan ekonomi yang lebih inklusif, tidak hanya untuk orang-orang Inggris saja. Dua klaim tersebut tetap dapat dibaca sebagai cara kelas menengah Inggris mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan. Baik dengan jalur yang lebih eksklusif maupun inklusif.

Tuntutan Brexit

Perjanjian perpisahan Inggris dari Uni Eropa setebal sekitar 500 halaman menetapkan seluruh cara Inggris melepaskan diri dari zona euro setelah lebih dari empat dekade keanggotaan. Perjanjian

perpisahan Inggris dari Uni Eropa setebal sekitar 500 halaman menetapkan seluruh cara Inggris melepaskan diri dari zona euro setelah lebih dari empat dekade keanggotaan. Di dalam perjanjian tersebut juga terdapat garis besar mengenai bentuk hubungan di masa depan antara keduanya, yang sepertinya mengarah ke membidik ikatan yang cukup erat. Berikut ini ringkasan dari beberapa poin utama perjanjian tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg:

Transisi

Inggris akan tetap berada dalam masa transisi dari saat meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019 hingga akhir 2020. Inggris akan kehilangan semua hak suara dan pengaruhnya Uni Eropa selama waktu itu, tetapi hak lainnya akan tetap sama, termasuk hak warga negara Eropa untuk tinggal dan bekerja di Inggris, pengawasan pengadilan Uni Eropa, dan pembayaran anggaran. Terdapat tambahan dalam perjanjian, yaitu Inggris dapat memperpanjang transisi. Tanggal akhir final belum ditetapkan, dan Inggris akan perlu memutuskan apakah ingin diperpanjang hingga Juni 2020. Pihak-pihak pro-Brexit tidak senang akan poin ini.

Hubungan Masa Depan

Hubungan di masa yang akan datang masih harus dinegosiasikan secara penuh, tetapi Inggris dan UE bertujuan untuk

menetapkan "kawasan perdagangan bebas" sebagai hubungan masa depan yang akan datang. Hal ini akan menggabungkan kerja sama pengaturan dan bea cukai yang mendalam. Ini berarti Perdana Menteri Inggris Theresa May dapat mengatakan bahwa dia telah memenangkan hak atas kesepakatan perdagangan yang selalu dia inginkan. Namun, Inggris akan terikat dengan aturan UE, dan sulit untuk melihat bagaimana hal ini akan memudahkan Inggris melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Dampak lain dari poin ini adalah Inggris akan berpegang teguh pada standar UE untuk memastikan bahwa mereka menikmati persaingan yang sehat.

Keuangan

Kota London akan menurunkan peringkat dari *status quo*, tetapi ini selalu akan menjadi masalah. Hubungan masa depan akan didasarkan pada apa yang disebut kesetaraan, yang menjadi alat yang digunakan UE untuk semua bank negara non-UE lainnya. Kesepakatan ini sudah lama diharapkan oleh bank dan itulah sebabnya mereka dengan cepat mendirikan kantor di Eropa. Inggris berharap untuk mengunci keputusan kesetaraan sebelum akhir periode transisi sehingga bank memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

Perlindungan data

Inggris juga akan tetap menggunakan aturan data UE. Inggris juga menginginkan untuk mendapatkan izin UE yang dikenal sebagai keputusan kecukupan agar diadopsi sebelum akhir masa transisi.

Uang

Inggris setuju untuk membayar Uni Eropa sejumlah uang berdasarkan komitmen sebelumnya untuk anggaran Uni Eropa, yang mencakup bagian dari uang pensiun bagi staf Uni Eropa dan proyek-proyek Eropa yang ingin terus berlanjut. Inggris juga akan membayar biaya tahunan untuk menutupi periode transisi. Inggris memperkirakan bahwa ini akan menelan biaya sekitar 39 miliar poundsterling. Uni Eropa tidak pernah memberikan angka pasti. Jumlah ini akan dibayar selama bertahun-tahun dan UE akan mengirim faktur tahunan ke Inggris.

Hak

Kedua belah pihak sepakat untuk melindungi hak-hak warga negara mereka di wilayah masing-masing sebelum akhir periode transisi. Warga negara kedua belah pihak akan dilindungi “seumur hidup mereka” selama mereka mendaftar setelah lima tahun tinggal di wilayah berseberangan. Hakim AS akan dapat meminta Pengadilan Eropa untuk meminta nasihat tentang melindungi hak-hak ini.

Sengketa

Kedua belah pihak merancang struktur yang rumit untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Komite gabungan akan dibentuk dengan perwakilan dari Uni Eropa dan Inggris. Para pro-Brexit mengkhawatirkan adanya ikut campur Pengadilan Eropa dalam masalah sengketa.

SIMPULAN

Hasil referendum Brexit, terkait tetap bergabung atau berpisahnya Inggris dari Uni Eropa, telah menimbulkan turbulensi politik maupun ekonomi. Hanya dalam hitungan jam, Perdana Menteri David Cameron mengumumkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil referendum, yang semula ditujukan untuk meredam konflik internal Partai Konservatif yang saat ini sedang berkuasa. Kuat dugaan Boris Johnson akan menggantikan Cameron, mengingat posisi Johnson sebagai pendukung terkuat kubu Konservatif atas berpisahnya Inggris dari Uni Eropa. Hal yang unik, Johnson hingga Februari lalu masih berada dalam kubu mendukung Inggris tetap sebagai anggota Uni Eropa.

Partai Buruh sebagai oposisi pun tidak kurang terguncang. Tujuh menteri bayangan mengundurkan diri yang diduga kuat menunjukkan perpecahan di dalam Partai Buruh, dan tekanan kuat bagi Jeremy Corbyn untuk mengundurkan diri dari posisi pimpinan partai, mengingat Partai Buruh

Inggris adalah pendukung terkuat tetap tergabungnya Inggris dalam Uni Eropa. Guncangan di sisi politik Inggris ini sebanding dengan guncangan ekonomi dan keuangan yang terjadi. Nilai tukar Poundsterling pada Jumat lalu sempat terpangkas 10 persen, dan menjungkirkan posisi nilai tukar Poundsterling ke keadaan 30 tahun lalu. Bersama dengan itu, bursa saham London pun mengalami guncangan, melalui penurunan harga besar-besaran sebagaimana ditunjukkan oleh pelemahan FTSE 100 yang sempat mencapai 9 persen, sebelum ditutup melemah 3,2 persen. Aksi jual meluas ke bursa Amerika Serikat, setelah sebelumnya ikut membuat pasar Asia jeblok. Nilai kapitalisasi pasar global yang hilang pada 24 Juni lalu diperkirakan mencapai \$2,1 triliun.

Kepanikan yang terjadi mengindikasikan derajat ketidakpastian yang akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan Pasal 50 Konstitusi Uni Eropa, proses keluarnya sebuah negara anggota akan memakan waktu setidaknya dua tahun, sebelum dapat berlaku efektif. Selama rentang waktu tersebut, Inggris dan Eropa diperkirakan akan didera kelesuan ekonomi, sebelum titik keseimbangan baru dapat tercapai. Hal ini terjadi mengingat dalam proses keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, terdapat banyak rangkaian negosiasi baru perlu dilakukan oleh

Pemerintah Inggris dengan Uni Eropa, sebagai persyaratan administratif. Guncangan politik Inggris yang terjadi mengisyaratkan akan munculnya pemerintahan koalisi baru, yang terpaksa mengakomodasi berbagai kepentingan yang dapat bertolak belakang dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa. Dan sebagaimana sering terjadi, koalisi yang lemah cenderung menimbulkan instabilitas baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Hunt & Brian Wheeler, 'Brexit: All You Need To Know About The UK Leaving The EU,' *BBC News* (daring), 30 March 2017, <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>, diakses 1 Nopember 2019
- BBC, "Brexit: Petition for second EU referendum rejected". BBC News. 9 Juli 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- BBC, "Brexit: Theresa May to trigger Article 50 by end of March". BBC News. 2 Oktober 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- BBC, "Brexit: What are the options? Alternative Brexit models". BBC News. 15 Januari 2017. Diakses tanggal 1 Nopember 2019
- BBC, "David Cameron promises in/out referendum on EU". BBC News. 23 Januari 2013. Diakses 1 Nopember 2019.
- BBC, "David Cameron sets out EU reform goals". BBC News. 11 November 2015. Diakses 1 Nopember 2019.
- BBC, EU referendum: Lord Rose says it is 'patriotic' to remain in the EU". BBC

- News. 12 Oktober 2015. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- BBC, EU referendum: Who's who guide to the UK exit campaigns". BBC News. 14 Maret 2016. Diakses 1 Nopember 2019.
- Bloomberg News, *Britain's Brexit Referendum: Key Players* (daring), 23 June 2016, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-23/eu-referendum-the-key-brexit-players-from-cameron-to-carney>, diakses 1 Nopember 2019
- Civil Service World, "Theresa May signals Whitehall rejig with two new Cabinet posts". 13 Juli 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- Crowson, Nicholas J. (2007). *The Conservative Party and European integration since 1945 : at the heart of Europe?*. London: Routledge. ISBN 9780415400220.
- Edward, Aldred, 'Brexit: Where Do The Parties Stand?' *OpenEuropeBerlin* (daring), <http://www.openeuropeberlin.de/brexit-where-do-the-parties-stand-by-edward-alred/>, diakses 1 Nopember 2019
- Ellie Mae O'Hagan, 'Wales Voted For Brexit Because It Has Been Ignored By Westminster For Too Long,' *Independent* (daring), 25 June 2016, <http://www.independent.co.uk/voices/brexit-wales-eu-referendum-vote-leave-uk-ignored-by-westminster-a7102551.html>, diakses 1 Nopember 2019
- European Commission. "Brexit preparedness". Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- Goodman, Peter S. "'Brexit,' a Feel-Good Vote That Could Sink Britain's Economy". The New York Times. 20 Mei 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019
- Hooton, Christopher. "Brexit: Petition for second EU referendum so popular the government site's crashing". *The Independent*. 24 Juni 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- Hunt, Alex, Wheeler, Brian "The UK's EU referendum: All you need to know". BBC News. 24 Mei 2018. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- Kaukab, M. E., & Sahide, A. (2020). Perjanjian Perdagangan Asimetri Indonesia-Eropa-Inggris Pasca Brexit. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 11-18.
- Mayhew, Ken. (2017). "UK higher education and Brexit". *Oxford Review of Economic Policy*. 33 (suppl_1): S155–S161. doi:10.1093/oxrep/grx012. ISSN 0266-903X.
- Mctagu, Tom, "UK confirms it will leave customs union". Politico. 2 Februari 2017. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.
- Political Studies Association, 'The UK In A Changing Europe For Political Studies Association Of The UK, Brexit And Beyond: How The United Kingdom Might Leave The European Union', London, 2016, hlm. 16-17
- Portes, Jonathan (2016). "Immigration after Brexit". *National Institute Economic Review*. 238 (1): R13–R21. doi:10.1177/002795011623800111. ISSN 0027-9501.
- Sampson, Thomas. (2017). "Brexit: The Economics of International Disintegration". *Journal of Economic Perspectives*. 31 (4): 163–184. doi:10.1257/jep.31.4.163. ISSN 0895-3309.
- Sampson, Thomas; Novy, Dennis; Leromain, Elsa; Breinlich, Holger. "The consequences of the Brexit vote for UK inflation and living standards:

First evidence". VoxEU.org. 20 November 2017. Diakses tanggal 1 Nopember 2019

Spaventa, Eleanore. "Explaining the EU deal: the "emergency brake"". Fullfact.org. 22 februari 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

Stone, Jon, "Vote Leave designated as official EU referendum Out campaign". *The Independent*. 13 April 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

Swidlicki, Paweł "New Open Europe/ComRes poll: Failure to win key reforms could swing UK's EU referendum vote". *Open Europe*. 16 Desember 2015. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

The Electoral Commission, "EU Referendum results". Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

The Guardian, "Live election results".7 May 2015. Diakses 1 Nopember 2019.

UK Parliament, "European Union (Referendum) Bill (HC Bill 11)". Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

UK Parliament, "Prime Minister sets out legal framework for EU withdrawal". 22 Februari 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

Wilkinson, Michael, "Theresa May confirms Britain will leave Single Market as she sets out 12-point Brexit plan". The Telegraph. 17 Januari 2017. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

Williamson, Adrian, "The case for Brexit: lessons from the 1960s and 1970s". History & Policy. History & Policy. 5 Mei 2015. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.

Wyatt QC, Derrick, "Explaining the EU deal: the 'red card'". fullfact.org. 22 Februari 2016. Diakses tanggal 1 Nopember 2019.